

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA:

Dari Poros Maritim ke Persaingan Indo-Pasifik

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng: **Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Poros
Maritim ke Persaingan Indo-Pasifik**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

12 Maret 2026

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA: DARI POROS MARITIM KE PERSAINGAN INDO-PASIFIK

1. Pendahuluan

Diplomasi maritim Indonesia pada dua dasawarsa terakhir bergerak dari bahasa pembangunan nasional menuju bahasa geopolitik kawasan. Pada awal pemerintahan Joko Widodo, tema utamanya adalah **Poros Maritim Dunia**—sebuah visi yang menempatkan laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan sumber identitas, konektivitas, kedaulatan, dan kemakmuran nasional. Dalam pidato Presiden Joko Widodo di KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw pada 13 November 2014, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang harus menjadi “Poros Maritim Dunia,” dengan lima pilar utama: membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Namun, visi itu tidak berkembang di ruang hampa. Sejak pertengahan 2010-an, Indo-Pasifik menjadi istilah kunci dalam strategi regional berbagai kekuatan besar. Tiongkok memperluas pengaruh maritim dan infrastruktur melalui Belt and Road Initiative, sementara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia mengembangkan berbagai varian kerangka “Free and Open Indo-Pacific” dan pengaturan minilateral seperti Quad dan AUKUS. Dalam konteks itu, diplomasi maritim Indonesia tidak bisa lagi hanya berbicara tentang tol laut, pelabuhan, dan budaya maritim domestik. Ia harus menjawab pertanyaan yang lebih besar: bagaimana

menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di laut, sambil mencegah Asia Tenggara terseret menjadi medan rivalitas blok. (cejiss.org)

Karena itu, perjalanan diplomasi maritim Indonesia dapat dibaca sebagai transformasi dari **maritime nation-building** menuju **maritime strategic balancing**. Poros Maritim Dunia memberi fondasi identitas dan prioritas. Tetapi ketika rivalitas Indo-Pasifik mengeras, diplomasi maritim Indonesia semakin banyak diterjemahkan ke dalam bahasa ASEAN Centrality, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), keamanan maritim, kerja sama Samudra Hindia, batas maritim, blue economy, dan penguatan hukum laut internasional. Transformasi ini bukan berarti Poros Maritim Dunia ditinggalkan sepenuhnya. Yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai pergeseran dari visi besar yang berpusat pada pembangunan nasional ke strategi maritim yang lebih terhubung dengan kompetisi kawasan dan tata kelola regional yang lebih kompleks. (ASEAN)

Esai ini berargumen bahwa diplomasi maritim Indonesia berkembang dalam tiga tahap besar. Tahap pertama adalah artikulasi normatif Poros Maritim Dunia sebagai visi nasional dan regional. Tahap kedua adalah institusionalisasi diplomasi maritim melalui ASEAN, IORA, AIS Forum, negosiasi batas, dan penegasan hukum laut. Tahap ketiga adalah adaptasi terhadap arsitektur Indo-Pasifik baru, ketika Indonesia berusaha menjaga otonomi strategis melalui inklusivitas, sentralitas ASEAN, dan kerja sama yang konkret, sembari menghadapi kenyataan bahwa keamanan dan teknologi kawasan semakin dipengaruhi minilateralism dan rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, inti diplomasi maritim Indonesia hari ini bukan sekadar "menjadi poros," melainkan **menjaga ruang gerak di tengah persaingan Indo-Pasifik**. (ASEAN)

2. Poros Maritim Dunia sebagai Titik Awal

Poros Maritim Dunia lahir dari upaya mengoreksi orientasi pembangunan Indonesia yang terlalu lama berpaling dari laut. Dalam pidato Nay Pyi Taw 2014, Presiden Jokowi menegaskan bahwa posisi

Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik membuka peluang kerja sama regional dan internasional demi kemakmuran rakyat. Formulasi ini penting karena sejak awal Poros Maritim Dunia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai agenda domestik. Ia juga diproyeksikan sebagai identitas strategis Indonesia di tingkat regional dan global. Laut diperlakukan sebagai jembatan antara pembangunan nasional dan peran internasional. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Kelima pilar yang dirumuskan Jokowi menunjukkan keluasan cakupan visi tersebut. Poros Maritim Dunia mencakup budaya, ekonomi, infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan sekaligus. Dengan demikian, diplomasi maritim bukan bagian sampingan dari visi itu, melainkan salah satu pilar intinya. RSIS dalam kajiannya pada 2016 menegaskan bahwa deklarasi resmi Poros Maritim Dunia kepada audiens internasional terjadi di KTT Asia Timur 2014, dan bahwa lima pilar tadi membentuk fondasi konseptualnya. Kajian itu juga menekankan bahwa GMF bukan semata slogan pembangunan, tetapi bagian dari upaya jangka panjang Indonesia untuk membangun kembali identitas maritim, memperkuat engagement regional, dan menyusun kebijakan maritim nasional yang lebih komprehensif. (@RSIS_NTU)

Di sini, aspek identitas sangat penting. Poros Maritim Dunia bukan hanya proyek ekonomi, tetapi upaya merehabilitasi imajinasi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam kerangka ini, diplomasi maritim berfungsi ganda: ke luar, ia menegaskan posisi Indonesia dalam tata kelola regional; ke dalam, ia membangun kesadaran bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penguasaan laut, perbatasan, konektivitas antarpulau, dan kemampuan menjaga sumber daya kelautan. Karena itu, sejak awal terdapat hubungan erat antara diplomasi maritim dan agenda perbatasan, hukum laut, penegakan kedaulatan, serta kerja sama kawasan. Hal itu juga tercermin dalam dokumen kinerja Kementerian Luar Negeri yang menempatkan isu

maritim dan perbatasan sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Akan tetapi, sebagaimana banyak visi besar, Poros Maritim Dunia juga menghadapi persoalan penerjemahan. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa implementasi GMF pada periode pertama Jokowi menunjukkan kemajuan, tetapi juga menghadapi keterbatasan pada aspek ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Kajian 2023 tentang kemajuan dan prospek diplomasi maritim Jokowi misalnya menilai bahwa konsep GMF tetap relevan dan layak bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tetapi berbagai keterbatasan telah menghambat materialisasinya secara menyeluruh. Dengan kata lain, GMF berhasil mengubah bahasa kebijakan, tetapi tidak selalu secepat itu mengubah kapasitas kelembagaan dan hasil di lapangan. ([E-Journal of FISIP Unjani](#))

3. Dari Visi ke Praktik: Diplomasi Batas, Hukum Laut, dan Kedaulatan

Salah satu bentuk paling konkret diplomasi maritim Indonesia setelah 2014 adalah penguatan diplomasi batas dan hukum laut. Dokumen Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa isu kelautan, batas negara, dan kedaulatan merupakan bagian langsung dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dalam laporan kinerja Ditjen HPI dan dokumen renstra 2025–2029, percepatan penyelesaian batas darat dan maritim serta penguatan diplomasi pada penyempurnaan norma hukum dan penyelesaian sengketa menjadi fokus yang terus ditekankan. Ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo tidak menghapus relevansi dimensi kedaulatan dalam diplomasi maritim Indonesia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Pendekatan ini sangat penting karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak tetangga maritim dan wilayah laut yang luas. Dalam konteks demikian, diplomasi maritim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari negosiasi batas, penyusunan posisi hukum, dan

konsistensi pada UNCLOS 1982. Dalam laporan kinerja Kemlu, keterlibatan aktif Indonesia pada negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan, partisipasi dalam pembahasan Single Draft Negotiated Text, serta penyiapan pendapat hukum kewilayahan tercatat sebagai bagian dari kerja diplomasi yang berkelanjutan. Di balik kerja yang tampak teknis itu, sesungguhnya terdapat pertarungan penting untuk memastikan bahwa status Indonesia sebagai negara kepulauan dan pemilik hak berdaulat di laut tetap terlindungi dalam tatanan kawasan yang berubah. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Isu Natuna dan Laut Cina Selatan menjadi titik uji penting. Dalam keterangan resmi mengenai kerja sama maritim Indonesia–Tiongkok pada November 2024, pemerintah Indonesia menegaskan kembali bahwa klaim tertentu yang dikaitkan dengan Tiongkok tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Pernyataan ini sangat penting karena menunjukkan pola khas diplomasi maritim Indonesia: Jakarta tidak menginginkan eskalasi terbuka, tetapi tetap berusaha menegaskan posisi hukum dan hak berdaulatnya secara eksplisit. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak identik dengan konfrontasi, melainkan dengan kombinasi antara ketegasan normatif, kehati-hatian strategis, dan pengelolaan hubungan bilateral yang rumit. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Dengan demikian, dari Poros Maritim Dunia lahirlah suatu penguatan diplomasi kedaulatan di laut. Indonesia tidak lagi cukup sekadar menyatakan diri sebagai negara maritim. Ia harus mampu mengubah identitas itu menjadi posisi hukum, tata kelola perbatasan, dan praktik diplomatik yang konsisten. Di sinilah diplomasi maritim Indonesia memperoleh dimensi yang lebih keras: bukan hanya soal kerja sama dan konektivitas, tetapi juga soal delimitasi, interpretasi hukum, dan pengamanan kepentingan nasional di tengah klaim dan tekanan eksternal. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

4. Diplomasi Maritim sebagai Diplomasi Kawasan

Walaupun dimensi kedaulatan sangat penting, Indonesia tidak pernah membayangkan diplomasi maritim semata dalam kerangka bilateral dan pertahanan. Sejak awal, Poros Maritim Dunia juga mengandaikan bahwa Indonesia harus membangun kerja sama regional dan internasional. Di titik ini, ASEAN menjadi kanal utama. Dokumen renstra Ditjen Kerja Sama ASEAN menempatkan upaya menciptakan situasi kondusif di Laut Cina Selatan, mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, dan menginisiasi kerja sama maritim praktis ASEAN–Tiongkok sebagai bagian dari agenda strategis Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa diplomasi maritim Indonesia sejak pertengahan 2010-an semakin kuat ditambahkan pada mekanisme ASEAN-led.

[\(Ministry of Foreign Affairs Indonesia\)](#)

Kecenderungan ini makin jelas ketika istilah Indo-Pasifik mulai menguat. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific 2019 menegaskan bahwa ASEAN Centrality merupakan prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di Indo-Pasifik, dengan mekanisme ASEAN-led sebagai platform dialog dan implementasi. AOIP juga menegaskan empat area prioritas: kerja sama maritim, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi. Dari sini terlihat bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak lagi berbicara hanya atas nama Indonesia, tetapi juga melalui upaya membentuk perspektif kawasan yang lebih inklusif dan non-konfrontatif. Dalam banyak hal, AOIP adalah cara ASEAN—dengan Indonesia sebagai penggagas utama—untuk mengambil alih makna Indo-Pasifik dari logika kekuatan besar dan mengembalikannya ke logika kerja sama yang dipimpin Asia Tenggara.

[\(ASEAN\)](#)

Deklarasi ASEAN 2024 tentang AOIP memperkuat kecenderungan itu. Dokumen tersebut menegaskan kembali pentingnya ASEAN Centrality, mendorong mitra eksternal untuk melakukan kerja sama yang substantif, praktis, dan nyata pada area-area yang disepakati, serta

menghubungkan AOIP dengan pengarusutamaan empat area prioritasnya dalam mekanisme ASEAN-led. Ini berarti diplomasi maritim Indonesia tidak lagi cukup dipahami sebagai ekspresi unilateral negara kepulauan, tetapi sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa arsitektur Indo-Pasifik tetap memiliki elemen ASEAN-centred. ([ASEAN](#))

Dalam konteks ini, pergeseran dari Poros Maritim Dunia ke Indo-Pasifik sesungguhnya bukan perubahan total arah, melainkan **perubahan skala dan bahasa**. Jika GMF berbicara dari Indonesia ke kawasan, maka AOIP berbicara dari ASEAN ke Indo-Pasifik dengan Indonesia sebagai salah satu penggerak utamanya. Jika GMF menekankan pembangunan identitas dan kepentingan maritim Indonesia, maka AOIP menekankan bagaimana identitas dan kepentingan itu diartikulasikan dalam kerangka yang lebih luas, lebih inklusif, dan lebih diplomatis. ([ASEAN](#))

5. Samudra Hindia, IORA, dan Pelebaran Cakrawala Diplomasi Maritim

Satu kesalahan yang sering muncul dalam membaca diplomasi maritim Indonesia adalah menganggapnya terlalu terfokus pada Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara. Padahal, sejak awal Poros Maritim Dunia, Samudra Hindia juga merupakan bagian penting dari imajinasi strategis Indonesia. Pidato Jokowi 2014 sendiri menyebut posisi Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya, Indian Ocean Rim Association (IORA) menjadi salah satu forum utama tempat Indonesia mengekspresikan diplomasi maritimnya di lingkup yang lebih luas. IORA menempatkan *maritime safety and security*, perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, pengurangan risiko bencana, serta blue economy sebagai area prioritasnya. ([IORA](#))

Peran Indonesia di IORA cukup signifikan. Dokumen Kemlu dan IORA menunjukkan bahwa Indonesia memegang berbagai posisi kepemimpinan dalam *core bodies* IORA, termasuk pada isu perikanan

dan blue economy. Pada 2025, dalam pertemuan *Ad Hoc Committee on the Indian Ocean* di PBB, Indonesia menyatakan bahwa bersama Prancis, IORA telah mengadopsi *Guidelines on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, yang merupakan capaian strategis di bidang tata kelola maritim. Pada saat yang sama, *Colombo Communique 2025* menegaskan komitmen negara-negara IORA pada keselamatan dan keamanan maritim, peningkatan berbagi informasi, dan kerja sama antarlembaga maritim. Ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak hanya reaktif terhadap persaingan Indo-Pasifik, tetapi juga proaktif dalam membangun norma dan kerja sama di Samudra Hindia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Keterlibatan ini penting karena Samudra Hindia sering luput dari perhatian publik Indonesia dibanding Laut Cina Selatan. Padahal, secara strategis, Samudra Hindia adalah jalur energi, perdagangan, dan konektivitas yang sangat penting, sekaligus ruang tempat pengaruh India, Australia, negara-negara Teluk, dan kekuatan ekstra-regional bertemu. Dengan menjadikan IORA sebagai forum utama Samudra Hindia, Indonesia berusaha memperluas diplomasi maritimnya ke arah yang lebih seimbang: tidak hanya mengelola tekanan dari utara di Laut Cina Selatan, tetapi juga membangun peran normatif di barat melalui kerja sama Samudra Hindia. Pernyataan bersama 2+2 Australia–Indonesia 2025 bahkan menegaskan komitmen kedua negara pada IORA sebagai *premier forum* di kawasan Samudra Hindia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Dengan demikian, pelebaran ke Samudra Hindia menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak seharusnya direduksi menjadi “respons terhadap Tiongkok.” Ia juga merupakan upaya membangun identitas dan pengaruh lintas dua samudra, sesuai imajinasi dasar Poros Maritim Dunia. Dalam arti ini, IORA adalah salah satu jembatan antara warisan GMF dan realitas Indo-Pasifik baru. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

6. AIS Forum dan Upaya Indonesia Membangun Isu Maritim dari Selatan

Selain ASEAN dan IORA, Indonesia juga mengembangkan kanal diplomasi maritim lain melalui **Archipelagic and Island States (AIS) Forum**. Inisiatif ini penting karena memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin aktif di bawah kerangka yang sudah ada, tetapi juga membangun forum yang lebih mencerminkan kepentingan negara-negara kepulauan dan pulau kecil. Dokumen Kemlu menunjukkan bahwa Indonesia aktif menyelenggarakan rangkaian pertemuan AIS Forum, termasuk *The 1st High-Level Meeting* pada Oktober 2023 di Bali dan *5th Ministerial Meeting* pada Oktober 2024. Bahkan, laporan kerja sama multilateral Kemlu mencatat adanya rencana tiga kegiatan AIS Forum pada 2025. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Secara substantif, AIS Forum penting karena membawa diplomasi maritim Indonesia ke isu yang lebih luas daripada keamanan sempit: tata kelola pulau, perubahan iklim, ekonomi biru, ketahanan komunitas pesisir, dan solidaritas negara kepulauan. Ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia bukan semata strategi menghadapi kompetisi kekuatan besar, tetapi juga upaya membangun koalisi isu dan solidaritas normatif lintas Selatan Global. Dalam logika yang lebih halus, AIS Forum memperluas makna “poros” dari sekadar posisi geostrategis Indonesia ke kemampuan Indonesia untuk menjadi *agenda setter* pada isu maritim global tertentu. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Bila IORA memperlihatkan dimensi Samudra Hindia dan ASEAN memperlihatkan dimensi Asia Tenggara–Indo-Pasifik, maka AIS Forum menunjukkan dimensi **maritime coalition building** yang lebih normatif. Indonesia mencoba berbicara bukan hanya sebagai negara besar di ASEAN, tetapi juga sebagai representasi kepentingan negara-negara kepulauan yang menghadapi ancaman yang sama, terutama di bidang iklim, keberlanjutan laut, dan pembangunan pesisir. Ini memperkaya

diplomasi maritim Indonesia dan membuatnya lebih dari sekadar derivasi dari rivalitas AS–Tiongkok. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

7. Dari Poros ke Indo-Pasifik: Pergeseran Lingkungan Strategis

Namun bagaimanapun, faktor yang paling mengubah konteks diplomasi maritim Indonesia adalah mengerasnya lingkungan strategis Indo-Pasifik. Quad pada 2024 menegaskan dukungan pada Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, dan makmur, menegaskan dukungan tak tergoyahkan terhadap ASEAN unity and centrality, dan pada saat yang sama memperluas kerja sama praktis mereka pada keamanan maritim, teknologi kritis, keamanan siber, infrastruktur, dan penanganan krisis utang. Dalam bahasa resmi itu, terdapat paradoks yang jelas: Quad menghormati centrality ASEAN, tetapi juga bergerak sebagai pengaturan strategis yang berdiri di luar ASEAN-led mechanisms. ([DFAT](#))

AUKUS lebih menonjol lagi dari sisi keamanan keras. Halaman resmi AUKUS menegaskan bahwa kemitraan trilateral ini dimaksudkan untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, damai, aman, dan stabil, sambil memperdalam berbagi informasi dan teknologi, integrasi industri pertahanan, kapabilitas siber, AI, kuantum, dan kemampuan bawah laut. Bagi Indonesia, AUKUS menghadirkan dilema khas. Di satu sisi, Indonesia tidak ingin mengadopsi logika blok. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa mengabaikan bahwa arsitektur keamanan kawasan makin banyak dibentuk oleh pengaturan yang berada di luar forum ASEAN. Inilah salah satu titik ketika diplomasi maritim Indonesia harus beralih dari narasi poros menuju strategi pengelolaan persaingan. ([U.S. Department of War](#))

Karena itu, persaingan Indo-Pasifik memaksa Indonesia membaca ulang makna diplomasi maritim. Pada fase awal GMF, laut terutama dibayangkan sebagai sumber pembangunan, identitas, dan kebangkitan nasional. Pada fase Indo-Pasifik, laut juga menjadi ruang kontestasi teknologi, domain maritim, kebebasan navigasi, supply chain, energi, dan simbol keseimbangan strategis. Itulah sebabnya AOIP menjadi penting:

ia berfungsi sebagai upaya untuk menolak pembinggkaiian Indo-Pasifik semata-mata sebagai rivalitas. Namun semakin kuat realitas minilateralism dan perlombaan teknologi pertahanan, semakin besar juga kebutuhan Indonesia untuk membuat diplomasi maritimnya lebih realistis tanpa kehilangan preferensi dasarnya pada inklusivitas. ([ASEAN](#))

8. Indonesia di Tengah Persaingan: Bukan Netral Pasif, tetapi Otonomi Strategis

Indonesia sering digambarkan “netral” dalam persaingan Indo-Pasifik. Gambaran itu terlalu sederhana. Yang lebih tepat adalah bahwa Indonesia berusaha menjalankan **otonomi strategis**. Artinya, Indonesia tidak ingin terseret ke blok mana pun, tetapi juga tidak ingin pasif. Dalam studi akademik 2021, GMF dibaca sebagai strategi *middle power* Indonesia dalam merespons dua arus geopolitik utama, yaitu BRI Tiongkok dan FOIP/Quad. Kajian tersebut bahkan menyebut AOIP sebagai “extension of the GMF,” dan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara berusaha menyeimbangkan pengaruh Tiongkok dan Quad melalui kerangka GMF. ([cejiss.org](#))

Pembacaan ini berguna karena menjelaskan mengapa diplomasi maritim Indonesia tampak sering “ambigu” bagi pengamat luar. Indonesia dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa klaim yang bertentangan dengan UNCLOS tidak memiliki basis hukum. Indonesia dapat memperdalam kerja sama dengan Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, tetapi tetap menekankan ASEAN centrality dan menolak logika eksklusif. Indonesia dapat aktif di IORA dan AIS Forum, tetapi juga mendorong kerja sama praktis ASEAN–Tiongkok di area maritim. Pola seperti ini bukan inkonsistensi semata, melainkan ekspresi dari upaya menjaga ruang manuver seluas mungkin di tengah kompetisi besar yang tidak dapat diselesaikan Indonesia sendirian. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Dalam pengertian itu, diplomasi maritim Indonesia memiliki karakter khas *middle power diplomacy*: membangun forum, memproduksi norma, menekankan hukum internasional, dan memelihara komunikasi lintas kubu. Tetapi, berbeda dari middle power yang berbasis pada koalisi Atlantik, Indonesia menjalankan peran itu dari posisi negara kepulauan berkembang yang sangat bergantung pada stabilitas maritim. Karena itu, kebijakan maritim Indonesia tidak bisa hanya simbolik. Bila stabilitas laut terganggu, dampaknya langsung ke perdagangan, energi, perikanan, batas wilayah, dan legitimasi politik domestik. Itulah sebabnya diplomasi maritim Indonesia selalu menggabungkan bahasa prinsip dan bahasa kepentingan praktis. (cejiss.org)

9. AIPF dan Upaya Mengubah AOIP Menjadi Hasil Nyata

Salah satu langkah paling penting Indonesia dalam mentransformasikan diplomasi maritim ke fase Indo-Pasifik adalah penyelenggaraan **ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)** pada Keketuaan ASEAN 2023. Setkab menjelaskan bahwa AIPF dirancang sebagai implementasi konkret AOIP, untuk memperkuat kesatuan dan kepemimpinan ASEAN dalam mengelola perubahan geopolitik melalui *confidence building measures* dan kerja sama yang saling menguntungkan. Presiden Jokowi saat membuka AIPF menyebut bahwa forum tersebut menghimpun 93 proyek kerja sama senilai US\$38,2 miliar dan 73 proyek potensial senilai US\$17,8 miliar. Setkab juga merinci bahwa proyek-proyek itu mencakup infrastruktur hijau dan rantai pasok tangguh, pembiayaan berkelanjutan, serta transformasi digital inklusif. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Signifikansi AIPF melampaui angka komitmennya. Secara konseptual, forum ini menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha menggeser percakapan Indo-Pasifik dari semata keamanan menjadi konektivitas, green infrastructure, digital economy, dan supply chain resilience. Dengan kata lain, Indonesia mencoba mengatakan bahwa maritim bukan

hanya domain kapal perang, tetapi juga domain rantai pasok, energi, pelabuhan, dan pertumbuhan kawasan. Ini sepenuhnya sejalan dengan semangat awal Poros Maritim Dunia, tetapi kini diletakkan dalam bahasa AOIP yang lebih regional. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

AIPF juga mengindikasikan satu hal lain: Indonesia memahami bahwa sentralitas ASEAN tidak akan cukup dipertahankan hanya dengan komunikasi diplomatik. Ia harus diikat pada manfaat ekonomi dan konektivitas yang nyata. Jika tidak, maka ASEAN dan AOIP akan terus dikalahkan oleh minilateral arrangements yang lebih cepat, lebih fokus, dan lebih menarik bagi para aktor besar. Di sini terlihat sekali bahwa diplomasi maritim Indonesia telah bergerak jauh dari bahasa identitas maritim semata menuju bahasa *delivery* dan implementasi. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

10. Kontinuitas dan Penyesuaian di Bawah Pemerintahan Baru

Peralihan kekuasaan ke pemerintahan Prabowo tidak menghapus agenda maritim dari politik luar negeri Indonesia. Dokumen Renstra Kemlu 2025–2029 tetap menempatkan percepatan penyelesaian batas darat dan maritim, penguatan diplomasi pada norma hukum, dan penyelesaian sengketa sebagai fokus penting. Renstra Direktorat Asia Tenggara 2025–2029 juga secara eksplisit menempatkan kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik sebagai ruang strategis yang perlu dikelola, termasuk kelemahan, tantangan, dan risiko ke depan. Ini memperlihatkan adanya kesinambungan: isu maritim, perbatasan, dan Indo-Pasifik tetap berada di inti agenda diplomatik Indonesia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Di ranah bilateral dan minilateral, kontinuitas itu juga tampak. Pada 2025, Indonesia dan Australia meluncurkan Dialog Maritim Indonesia–Australia, sementara pernyataan bersama 2+2 mereka menegaskan komitmen pada IORA sebagai forum utama Samudra Hindia dan pada kerja sama trilateral Australia–Indonesia–India. Ini menunjukkan bahwa

diplomasi maritim Indonesia kini semakin terhubung dengan jaringan kerja sama yang lebih spesifik dan operasional, bukan hanya forum umum. Keterhubungan seperti ini penting karena memperluas modal diplomatik Indonesia tanpa mengharuskannya meninggalkan prinsip sentralitas ASEAN. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Pada saat yang sama, Indonesia tetap menautkan kerja sama dengan mitra besar pada AOIP dan hukum internasional. ASEAN–U.S. Leaders' Joint Vision Statement 2025 mengakui AOIP, menekankan pentingnya UNCLOS 1982, kerja sama maritim, keselamatan dan keamanan laut, kebebasan navigasi dan overflight, serta perdagangan maritim yang tidak terganggu. Dukungan seperti ini menguntungkan Indonesia karena memperkuat legitimasi AOIP dalam hubungan ASEAN dengan kekuatan besar. Tetapi Indonesia tetap harus waspada agar dukungan verbal itu tidak sekadar menjadi pelengkap retorik, sementara agenda strategis utama tetap ditentukan di luar mekanisme ASEAN-led. ([ASEAN](#))

11. Tantangan Pokok Diplomasi Maritim Indonesia

Meski telah berkembang jauh, diplomasi maritim Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan mendasar.

Tantangan pertama adalah **kesenjangan antara visi dan kapasitas**. Sejak era Poros Maritim Dunia, Indonesia berhasil mengubah bahasa strategisnya, tetapi tidak selalu secepat itu mengubah kapasitas kelembagaan, penegakan hukum, konektivitas, dan daya koordinasi antarlembaga. Kajian akademik tentang prospek GMF menilai bahwa konsep tersebut tetap relevan, tetapi banyak keterbatasan material, keamanan, dan kebijakan luar negeri telah menghambat progresnya. Tantangan ini masih relevan hingga sekarang: semakin luas agenda maritim Indonesia, semakin tinggi tuntutan atas koordinasi internal negara. ([E-Journal of FISIP Unjani](#))

Tantangan kedua adalah **mendamaikan inklusivitas dengan ketegasan**. Indonesia ingin menjaga Indo-Pasifik tetap inklusif, tidak eksklusif, dan tidak berbentuk blok. Tetapi pada saat yang sama, ia juga harus tegas dalam isu seperti Natuna, UNCLOS, IUU fishing, dan batas maritim. Keterangan resmi Indonesia mengenai kerja sama maritim dengan Tiongkok pada 2024 memperlihatkan bagaimana sulitnya menjaga keseimbangan itu: Jakarta ingin menjaga hubungan baik, tetapi juga harus menegaskan tidak adanya dasar hukum bagi klaim yang bertentangan dengan UNCLOS. Dalam diplomasi maritim, ketegangan semacam ini akan terus berulang. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah **pergeseran pusat gravitasi keamanan ke luar ASEAN**. Quad dan AUKUS mungkin sama-sama mengakui centrality ASEAN, tetapi keduanya tetap menciptakan lapisan arsitektur yang tidak dipimpin ASEAN. Bagi Indonesia, ini berarti sentralitas ASEAN hanya bisa bertahan jika dapat menawarkan sesuatu yang tidak diberikan minilateral security groupings: legitimasi, inklusivitas, dan manfaat konkret yang luas. Tanpa itu, ASEAN akan tetap penting secara seremonial, tetapi kalah penting secara strategis. ([DFAT](#))

Tantangan keempat adalah **pergeseran dari maritim sebagai isu fisik ke maritim sebagai isu teknologi dan data**. Hari ini, keamanan maritim bukan hanya soal armada dan batas, tetapi juga *maritime domain awareness*, AI, konektivitas bawah laut, siber, supply chain, dan mineral kritis. Quad 2024 dan AUKUS secara eksplisit menghubungkan Indo-Pasifik dengan teknologi kritis, AI, siber, dan kemampuan bawah laut. Bila diplomasi maritim Indonesia tetap dibatasi pada pengertian klasik laut sebagai ruang fisik, ia akan tertinggal dari perubahan domain maritim itu sendiri. ([DFAT](#))

12. Arah Strategis ke Depan

Ke depan, diplomasi maritim Indonesia tampaknya perlu bergerak pada empat arah utama.

Pertama, Indonesia perlu terus mengaitkan **kedaulatan maritim** dengan **diplomasi hukum**. Penyelesaian batas maritim, konsistensi pada UNCLOS 1982, dan kemampuan menghasilkan posisi hukum yang kuat harus tetap menjadi fondasi. Dalam lingkungan Indo-Pasifik yang penuh klaim, hukum internasional tetap merupakan salah satu instrumen paling penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Kedua, Indonesia perlu menjadikan **AOIP dan ASEAN Centrality** sebagai kerangka kerja yang lebih operasional. Itu berarti mendorong proyek-proyek konkret pada maritim, pelabuhan, rantai pasok, blue economy, search and rescue, HADR, dan maritime domain awareness, bukan sekadar menunggu mitra eksternal mengisi makna AOIP. Pengalaman AIPF menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghubungkan prinsip dan proyek; kemampuan itu perlu dilanjutkan lintas pemerintahan. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat **jalur Samudra Hindia** sebagai bagian integral dari diplomasi maritimnya. IORA, kerja sama Australia–Indonesia–India, dan agenda penanggulangan IUU fishing menunjukkan bahwa Samudra Hindia memberi Indonesia ruang kepemimpinan yang tidak kalah penting dibanding ASEAN. Bila selama ini perhatian publik terlalu tertuju ke Laut Cina Selatan, maka strategi Indonesia sebaiknya lebih seimbang antara utara dan barat. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Keempat, Indonesia perlu mengembangkan diplomasi maritim yang lebih terhubung dengan **teknologi, ekonomi digital, dan transisi energi**. Arsitektur Indo-Pasifik baru bukan hanya tentang kapal dan pangkalan, tetapi juga soal kabel, data, energi, EV ecosystem, pembiayaan hijau, dan rantai pasok tangguh. Dalam konteks ini, diplomasi maritim Indonesia harus memperluas dirinya dari domain hukum dan keamanan ke domain geoekonomi maritim yang lebih luas.

AIPF 2023 sudah memberi petunjuk ke arah itu. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

13. Penutup

Diplomasi maritim Indonesia telah menempuh perjalanan penting: dari **Poros Maritim Dunia** sebagai visi kebangkitan identitas dan pembangunan nasional, menuju strategi yang semakin kompleks dalam menghadapi **persaingan Indo-Pasifik**. Poros Maritim Dunia memberi lima pilar yang meletakkan laut di pusat imajinasi strategis Indonesia. Dari sana berkembang diplomasi batas, penegasan UNCLOS, keterlibatan dalam ASEAN, IORA, AIS Forum, dan upaya membangun kerja sama maritim yang lebih luas. Ketika Indo-Pasifik berubah menjadi arena persaingan kekuatan besar, diplomasi maritim Indonesia pun menyesuaikan diri: dari poros yang bernuansa kebangkitan nasional menjadi instrumen *strategic balancing* yang menekankan inklusivitas, sentralitas ASEAN, dan kerja sama konkret. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Yang menarik, perubahan itu bukanlah cerita tentang penggantian total satu visi oleh visi lain. Ia lebih tepat dipahami sebagai **evolusi**. Unsur-unsur dasar Poros Maritim Dunia—identitas kepulauan, pentingnya diplomasi maritim, pembangunan konektivitas, dan penguatan pertahanan laut—tetap hidup. Tetapi unsur-unsur itu kini dibawa ke arena yang jauh lebih kompetitif, di mana AOIP, ASEAN Centrality, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, AUKUS, Quad, dan arsitektur keamanan-teknologi baru memaksa Indonesia berpikir lebih strategis dan lebih adaptif. ([@RSIS NTU](#))

Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi maritim Indonesia tidak akan diukur hanya dari seberapa sering Indonesia berbicara tentang laut, atau seberapa indah visi maritimnya dirumuskan. Ia akan diukur dari seberapa jauh Indonesia mampu menjaga kedaulatan dan kepentingannya di laut, memimpin forum yang relevan, membangun kerja sama yang nyata, dan

tetap memiliki ruang gerak strategis di tengah Indo-Pasifik yang semakin dipenuhi rivalitas. Dalam pengertian itulah, perjalanan dari Poros Maritim ke persaingan Indo-Pasifik bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perubahan ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. ([Ministry of Foreign Affairs Indonesia](#))

Glosarium

1. Poros Maritim Dunia (PMD / Global Maritime Fulcrum)

Visi strategis yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada 2014 untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maritim yang berpengaruh, dengan lima pilar utama: budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim.

2. Diplomasi maritim

Penggunaan instrumen diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional di laut, termasuk batas maritim, keselamatan pelayaran, kerja sama kelautan, hukum laut, dan stabilitas kawasan. Dalam konteks Indonesia, diplomasi maritim terkait erat dengan kedaulatan, ASEAN, IORA, dan Indo-Pasifik.

3. Negara kepulauan (archipelagic state)

Negara yang terdiri atas gugusan pulau dan perairan yang menurut hukum internasional diperlakukan sebagai satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Status ini sangat penting bagi Indonesia dalam menegaskan hak-hak maritimnya berdasarkan UNCLOS 1982.

4. UNCLOS 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yaitu kerangka hukum internasional utama yang mengatur laut, zona maritim, hak

berdaulat, kebebasan navigasi, dan penyelesaian sengketa maritim. Indonesia secara konsisten menjadikannya dasar posisi hukumnya.

5. Batas maritim

Garis pembatas yurisdiksi laut antara satu negara dan negara lain, yang menentukan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Penyelesaian batas maritim merupakan salah satu fokus berkelanjutan diplomasi Indonesia.

6. Kedaulatan maritim

Kemampuan negara untuk menegakkan hak dan kewenangannya atas wilayah laut, perairan kepulauan, laut teritorial, serta hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dalam kebijakan Indonesia, kedaulatan maritim berkait dengan penegakan hukum, diplomasi, dan keamanan laut.

7. ASEAN Centrality

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap berada di pusat arsitektur kawasan, termasuk di Indo-Pasifik, melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. Bagi Indonesia, prinsip ini menjadi jangkar agar kawasan tidak sepenuhnya dibentuk oleh rivalitas kekuatan besar.

8. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Dokumen ASEAN tahun 2019 yang mendefinisikan pendekatan kawasan terhadap Indo-Pasifik sebagai ruang dialog dan kerja sama yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. AOIP banyak dipandang sebagai perluasan logika Poros Maritim Dunia ke tingkat kawasan.

9. Indo-Pasifik

Ruang strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kini menjadi arena utama perdagangan, konektivitas, keamanan maritim, teknologi, dan persaingan kekuatan besar. Dalam pendekatan ASEAN dan Indonesia, Indo-Pasifik idealnya dikelola melalui kerja sama, bukan blok konfrontatif.

10. IORA (Indian Ocean Rim Association)

Organisasi kawasan Samudra Hindia yang memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota pada isu keselamatan maritim, perdagangan, blue economy, perikanan, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, IORA adalah jalur penting untuk memperluas diplomasi maritim ke Samudra Hindia.

11. AIS Forum (Archipelagic and Island States Forum)

Forum yang diprakarsai Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama negara kepulauan dan pulau kecil, terutama pada isu laut, perubahan iklim, ekonomi biru, dan ketahanan komunitas pesisir.

12. AIPF (ASEAN-Indo-Pacific Forum)

Forum yang diluncurkan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 untuk menerjemahkan AOIP menjadi kerja sama konkret, khususnya di bidang infrastruktur hijau, rantai pasok tangguh, pembiayaan berkelanjutan, dan transformasi digital.

13. Blue economy

Pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem. Konsep ini muncul kuat dalam agenda IORA, AOIP, dan AIS Forum.

14. IUU Fishing

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, yakni penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Isu ini menjadi salah satu fokus diplomasi maritim Indonesia, termasuk dalam kerja sama IORA.

15. Minilateralisme

Bentuk kerja sama yang melibatkan sejumlah kecil negara dengan agenda tertentu, biasanya lebih cepat dan lebih fokus daripada forum multilateral besar. Dalam Indo-Pasifik, format seperti Quad dan AUKUS

sering dipandang sebagai tantangan sekaligus konteks baru bagi diplomasi maritim Indonesia dan ASEAN.

16. Otonomi strategis

Kemampuan negara untuk menjaga ruang geraknya sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar, tanpa sepenuhnya berpihak ke satu blok. Dalam praktik Indonesia, ini tampak pada upaya menjaga hubungan dengan banyak mitra sekaligus sambil mempertahankan prinsip hukum internasional dan centrality ASEAN.

Daftar Pustaka (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Association of Southeast Asian Nations. (2024, October 9). *ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the Future-Ready ASEAN and ASEAN-Centered Regional Architecture*.

Association of Southeast Asian Nations. (2025, May 26). *ASEAN 2045: Our shared future*.

Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2015). *Indonesia's maritime doctrine and security concerns*. S. Rajaratnam School of International Studies.

Indian Ocean Rim Association. (2025, May 21). *The Colombo Communiqué*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional tahun 2023*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Rencana strategis Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 2025–2029*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, November 14). *Keterangan pers tentang kerja sama maritim RI–Tiongkok dalam pernyataan bersama RI–Tiongkok*.

Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global maritime fulcrum: Indonesia's middle power strategy between Belt and Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15(3), 30–54. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, November 13). *Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar.*

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 5). *Presiden Jokowi buka ASEAN-Indo-Pacific Forum.*

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 15). *Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan tantangan.*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 12 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69acf5b9-8798-839d-83f0-cffa92d7b98c>